



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Dampak Foreign Direct Investment yang Diberikan Amerika
Serikat Terhadap Kesenjangan Sosial di Indonesia Pada Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono***

Skripsi

Oleh
Kerin Desyola Alusima
2016330144

Bandung
2019



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Dampak *Foreign Direct Investment* yang Diberikan
Amerika Serikat Terhadap Kesenjangan Sosial di
Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono**

Skripsi

Oleh

Kerin Desyola Alusima

2016330144

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP. M.A.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Kerin Desyola Alusima
NPM : 2016330144
Judul : Dampak *Foreign Direct Investment* yang Diberikan Amerika Serikat Terhadap Kesenjangan Sosial di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 18 Desember 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto H..

: 

Anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A

: 

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP. M.A

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kerin Desyola Alusima
NPM : 2016330144
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Dampak *Foreign Direct Investment* yang Diberikan Amerika Serikat Terhadap Kesenjangan Sosial di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 26 Desember 2019



Kerin Desyola Alusima

2016330144

ABSTRAK

Nama : Kerin Desyola Alusima

NPM : 2016330144

Judul : Dampak *Foreign Direct Investment* yang Diberikan Amerika

Serikat Terhadap Kesenjangan Sosial di Indonesia Pada Masa Pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono

FDI merupakan salah satu kerjasama ekonomi internasional yang dianggap paling efektif untuk memicu pertumbuhan ekonomi khususnya bagi negara dunia ketiga yang mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalannya. Di bawah kepemimpinan Yudhoyono, Indonesia secara garis besar berhasil menciptakan iklim investasi yang mampu menarik masuknya investasi asing khususnya dari Amerika Serikat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,39%. Sayangnya di waktu yang bersamaan, kesenjangan sosial di Indonesia terus meningkat diwakili koefisien Gini dari 0,30 pada tahun 2000 hingga mencapai 0,413 sebagai puncak kesenjangan sosial tertinggi selama kemerdekaan Indonesia.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan dampak yang diberikan investasi asing terhadap kesenjangan sosial menggunakan teori modernisasi yang memandang kesenjangan sosial sebagai bagian dari proses modernisasi yaitu perubahan yang dialami negara berkembang dari dominasi sektor agrikultur ke sektor industri manufaktur. Dalam praktiknya, FDI hanya diberikan pada sektor industri manufaktur yang dianggap berpotensi paling besar dalam jangka panjang. Padahal negara berkembang masih didominasi oleh sektor agrikultur. Ketidakseimbangan antara sektor ini memicu terjadinya kesenjangan sosial yang menjadi bagian dari proses modernisasi yaitu tahap pembangunan. Namun dalam jangka panjang, jumlah sektor industri manufaktur akan terus mengalami pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Negara yang perekonomiannya telah didominasi sektor industri manufaktur, merupakan tahap yang terjadi setelah tahap pertama yaitu tahap modernisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pertumbuhan sektor industri manufaktur di Indonesia telah mencapai angka 6,8 per tahunnya saat pertumbuhan sektor agrikultur hanya sebesar 3,4. Kontribusi sektor industri manufaktur yang terus menguat juga dibuktikan dengan kontribusi yang diberikan terhadap pertumbuhan PDB nasional yang mencapai US\$ 1.000 triliun dolar sebesar 21,30% di akhir tahun pemerintahan Yudhoyono.

Kata kunci : *foreign direct investment*, kesenjangan sosial, modernisasi

ABSTRACT

Nama : Kerin Desyola Alusima

NPM : 2016330144

Judul : *The Impact of United States Foreign Direct Investment on*

Social Inequality in Indonesia During The Susilo Bambang Yudhoyono

Government

The importance of Foreign Direct Investments (FDI) has increased significantly cause its offers huge opportunities for mostly developing countries to reach faster economic growth through trade and investment. During Yudhoyono's tenure, Indonesia broadly succeeded in creating an investment climate that was able to attract foreign direct investment, especially from the United States with an average growth of 27.39%. Unfortunately, social inequality in Indonesia continued to increase represented by the Gini coefficient from 0.30 in 2000 to 0.413 as the highest rate of social inequality during Indonesian independence.

This paper seeks to explain the impact of foreign investment on social inequality using modernization theory which views social inequality as part of the modernization process in less developed countries from agricultural dominance to industrialization country. This theory divides the process of modernization into two stages. The first stage occurs when the FDI only given to the manufacturing sector which is considered to have the biggest potential in the long run. Nonetheless, developing countries are still dominated by the agricultural sector. This imbalance between sectors cause social inequality. However, in the long term the second stage occurs when the number of manufacturing industry sectors will continue to growth, boost national economic growth and distribute income

Based on observations, it was found that the manufacturing industry sector in Indonesia had reached 6.8 per year when the growth of the agricultural sector was only 3.4. The contribution of the manufacturing industry sector which continues to strengthen is also evidenced by the contribution made to the growth of national GDP which reached US \$ 1,000 trillion by 21.30% at the end of the Yudhoyono's tenure.

Keywords: *foreign direct investment, inequality, modernization*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian yang telah disusun ditujukan untuk menganalisis modal asing berupa *foreign direct investment* yang diberikan oleh Amerika Serikat di Indonesia. Dalam penelitian ini, dilakukan pula analisis sederhana untuk mengkorelasikan investasi asing tersebut dengan kesenjangan sosial yang terjadi khususnya di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Karya tulis yang disusun oleh penulis masih jauh dari kata sempurna sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat terjawab dengan baik. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan segala macam masukan baik merupakan saran maupun kritik yang akan digunakan untuk menyempurnakan hasil penelitian yang lebih baik kedepannya.

Bandung, 3 Desember 2019

Kerin Desyola Alusima

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur untuk Tuhan Yesus karena berkat dan izin-Nya, saya dapat menuntaskan masa pendidikan yang saya tempuh di Universitas Katolik Parahyangan bersama dengan orang – orang luar biasa yang masih bersama saya hingga saat ini.

1. Pertama – tama adalah ucapan terimakasih untuk Tuhan Yesus yang tidak pernah membiarkan penulis berjalan sendiri bahkan tak henti – hentinya menunjukkan kasih melalui rancangan-Nya yang tidak pernah terpikirkan maupun terbayangkan.
2. Untuk Papa, Mama, Syella dan Kiel yang memberikan dukungan dalam berbagai bentuk selama lebih dari 21 tahun sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
3. Untuk Mas Adrianus Harsawaskita sebagai dosen pembimbing yang diberikan Tuhan melalui jalan yang tidak pernah penulis bayangkan. Terimakasih karena tidak hanya memberikan pandangan dalam menyelesaikan permasalahan skripsi namun juga pandangan dan prinsip - prinsip dalam segala tantangan hidup ke depannya.
4. Untuk Budiman, teman yang selalu berada di titik – titik terendah selama masa perkuliahan khususnya semester akhir sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Ayo kita sukses dan menjadi *rich* barengan !
5. Untuk Putri, terimakasih sudah menjadi penyulut kepanikan dalam proses pembuatan skripsi. Sehingga penulis tidak berleha – leha dan

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Semoga anda segera diberikan kesuksesan dan jodoh sesuai dengan keinginan Tuhan dan keluarga.

6. Untuk Tutin, terimakasih sudah menjadi tempat ngomel – ngomel tentang lika liku skripsi, kekeluargaan dan hal – hal random lainnya. Terimakasih sudah tahu bahwa penulis aneh tapi tetap berteman.
7. Untuk Cindi, mari membawa permusuhan ini ke level kesuksesan dan kekayaan yang lebih tinggi. Terimakasih sudah selalu mengajarkan untuk menata tingkat urgensi kepanikan.
8. Untuk Nanda, terima kasih untuk setiap tawa dan rasa iri meskipun iri hati ialah dosa dan upah dosa ialah maut. Penulis mendoakan semoga Nanda selalu rajin makan dan kecilnya tidak bikin iri lagi. Sukses terus BTS dan Nanda.
9. Untuk Geta, keluarga dari SMA yang meskipun jauh namun selalu menjadi *hooman diary* 24/7. Penulis selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilan diet kita demi mencapai *body goals*.
10. Untuk keluargaku di HI, Warta Himahi. Terimakasih untuk semua kemarahan, kepanikan, tunggakan uang kas dan kekeluargaan yang tidak akan pernah penulis lupakan dan akan menjadi salah satu dari kenangan terbaik semasa kuliah.
11. Untuk delegasi Belanda yang menjadi keluarga selama semester terakhir ini. Terimakasih sudah membuka cakrawala penulis tentang kehidupan dan setiap omelan papa dipicu oleh delegasi yang selalu bubar jam 9

malam. Penulis selalu mendoakan semoga setiap anggotanya dapat sukses selalu.

12. Terakhir, untuk setiap dosen HI unpar, keluarga, HI UNPAR 2016 dan orang – orang luar biasa lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang tentu tidak sebanding dengan apa yang telah kalian berikan bagi penulis, terima kasih banyak.

DAFTAR ISI

Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Akronim	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Pembatasan Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1. Kajian Literatur	9
1.4.2. Kerangka Pemikiran	17
1.5.Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.5.1. Metode Penelitian.....	26
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data	27
1.6.Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KEBIJAKAN DAN HUBUNGAN KERJASAMA EKONOMI DALAM BENTUK <i>FOREIGN DIRECT INVESTMENT</i> OLEH AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA	30
2.1. Kebijakan <i>Foreign Direct Investment</i> di Indonesia.....	30
2.2. Kebijakan Investasi Asing dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.....	35
2.3. Kebijakan Pemberian <i>Foreign Direct Investment</i> di Amerika Serikat .	39

2.4. Hubungan Kerjasama Ekonomi di Antara Amerika Serikat dan Indonesia.....	44
--	----

BAB III PEMASUKAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* DARI AMERIKA SERIKAT DIKUTI PENINGKATAN KOEFISIEN GINI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN YUDHOYONO 48

3.1. Pemasukan <i>Foreign Direct Investment</i> dari Amerika Serikat diikuti Peningkatan Koefisien Gini Indonesia Pada Masa Pemerintahan Yudhoyono	48
--	----

3.1.1. <i>Foreign Direct Investment</i> Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono	50
---	----

3.1.2. <i>Foreign Direct Investment</i> sebagai Dorongan Dalam Upaya <i>Pengentasan</i> Kesenjangan Sosial di Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.	58
--	----

3.2. Peningkatan dan Penurunan Kesenjangan Sosial sebagai Dampak dari Pemberian <i>Foreign Direct Investment</i> oleh Amerika Serikat	64
---	----

3.2.1. Peningkatan Koefisien Gini Sebagai Dampak dari Pemberian <i>Foreign Direct Investment</i> dalam Jangka Pendek ..	64
---	----

3.2.2. Penurunan Koefisien Gini Sebagai Dampak Dari Pemberian <i>Foreign Direct Investment</i> dalam Jangka Panjang .	69
---	----

BAB IV KESIMPULAN 78

DAFTAR PUSTAKA 81

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Pemasukan <i>Foreign Direct Investment</i> di Indonesia tahun 2004 - 2014.....	51
Tabel 3.2	Grafik Investasi Asing tahun 2004 – 2014.....	52
Tabel 3.3	Daftar Negara Tujuan Investasi Sedunia di Tahun 2012.....	53
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDB Dunia, China dan Indonesia 2002 - 2014.....	54
Tabel 3.5	Perkembangan Koefisien Gini 1965 - 2016.....	59
Tabel 3.6	Penerimaan Investasi Asing di Indonesia Tahun 2013-2015.....	65
Tabel 3.7	PDB atas Harga Berlaku Menurut Sektor.....	67
Tabel 3.8	Tingkat Koefisien Gini di Indonesia 2010 – 2018.....	76

DAFTAR AKRONIM

FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
LDCs	<i>Less Developed Countries</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
WTO	<i>World Trade Organization</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
AS	Amerika Serikat
U.S.	<i>United States</i>
PMA	<i>Penanaman Modal Asing</i>
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
ODA	<i>Official Development Assistance</i>
TNCs	<i>Transnational Corporations</i>
DNI	Daftar Negatif Investasi
RRC	Republik Rakyat Tiongkok
R&D	<i>Research and Development</i>
TIFA	<i>Trade and Investment Framework Agreement</i>
UUD	Undang Undang Dasar
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
MP3EI	<i>Master Plan for Acceleration and Expansion of Economic Development</i>

ANCHAM	<i>American Chamber Of Commerce In Indonesia</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
UMP	Upah Minimum Provinsi
UMR	Upah Minimum Regional
FCPA	<i>Foreign Corruption Practices Act</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
NGO's	<i>Non-Governmental Organization</i>
NEI	<i>National Export Initiatives</i>
OPIC	<i>Overseas Private Investment Corporation</i>
GEP	<i>Global Entrepreneurship Program</i>
USTDA	<i>United States Trade And Development Agency</i>
KPS	Kerjasama Pemerintah Dan Swasta
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
ANCHAM	<i>American Chamber Of Commerce In Indonesia</i>
IKM	Industri Kecil Menengah
OVOP	<i>One Village One Product</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Foreign direct investment atau investasi asing adalah investasi yang dilakukan oleh aktor ekonomi di suatu negara melintasi batasan negaranya atau di negara lain. Investasi ini pada umumnya dilakukan dengan membeli sebuah perusahaan di negara penerima investasi atau dengan memperluas operasi bisnis lokal ke negara penerima investasi. Pada dasarnya investasi asing dilakukan untuk mencari keuntungan tertentu di negara penerima seperti harga tenaga kerja yang lebih murah, kebijakan negara penerima yang menguntungkan perusahaan investor seperti pajak yang lebih rendah, dan sebagainya. IMF dan OECD menyatakan bahwa investasi ini dilakukan untuk melakukan kerjasama dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang bagi pihak investor maupun pelaku bisnis sebagai penerima investasi.¹

Di tahun 1980 hingga 1990, jumlah *foreign direct investment* yang dilakukan di dunia meningkat hingga tiga kali lebih banyak khususnya oleh perusahaan – perusahaan di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Hal ini dipicu oleh sektor bisnis di negara – negara tersebut yang mendapatkan keuntungan ketika mereka memperluas perusahaannya khususnya ke negara dunia ketiga. Keuntungan ini berasal dari negara dunia ketiga yang menawarkan harga buruh yang lebih rendah,

¹ B. Sudha, “Foreign Direct Investment,” *International Journal of Scientific Research*, no. 2277 (2013): hlm. 175.

akses pasar baru yang lebih menguntungkan, biaya transportasi yang lebih rendah karena dekat dengan sumber daya alam yang berlimpah dan sebagainya.

Bukan hanya menguntungkan investor, hal ini juga menguntungkan negara berkembang sebagai penerima *foreign direct investment* yang pada masa itu sangat membutuhkan modal asing berupa transfer teknologi, kapabilitas manajemen, dan sebagainya untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara.² Karena menguntungkan kedua belah pihak, tidak mengherankan investasi asing tumbuh menjadi salah satu bentuk transfer modal internasional utama di akhir dekade ini.

World Economic Forum meyakini bahwa *foreign direct investment* merupakan kunci utama dari pertumbuhan dan kesejahteraan baik negara berkembang maupun negara maju. Terlebih lagi investasi asing merupakan cara paling efektif untuk mendorong ekonomi global dengan membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pemerataan teknologi, tingkat dan kualitas edukasi serta produktivitas baik di negara maju dan negara berkembang yang sangat membutuhkan kemajuan tersebut.³ Karena dianggap vital bagi pembangunan dan integrasi nasional maupun internasional dalam jangka panjang berbagai organisasi dunia seperti PBB, WTO dan OECD dalam nada yang sama sangat mendukung pertumbuhan investasi asing dalam aktivitas ekonomi internasional. Secara resmi PBB menyatakan bahwa investasi asing merupakan dorongan vital bagi

² Kenneth A. Froot, "Introduction to Foreign Direct Investment," *National Bureau of Economic Research*, (1993): hlm. 10.

³ Kenneth Paul Tan, "Foreign Direct Investment as a Key Driver for Trade, Growth and Prosperity: The Case for a Multilateral Agreement on Investment," *World Economic Forum*, (2013): hlm. 9.

pertumbuhan ekonomi dunia karena menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menggerakkan perekonomian sehingga mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan dunia.

Salah satu negara berkembang yang hingga kini menjadi salah satu negara yang berhasil menarik investor asing adalah Kamboja. Sejak 1999, Kamboja terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.⁴ Hal ini seiring dengan penerimaan investasi asing yang cenderung meningkat. Terdapat hubungan yang saling menguatkan di antara investasi yang dilakukan dalam jangka panjang dengan pertumbuhan ekonomi negara penerima melalui kegiatan ekspor dan impor. Bukan hanya Kamboja, India juga mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan yang digerakkan oleh pertumbuhan sektor bisnis secara berkelanjutan.⁵ Sebagai negara berkembang, pertumbuhan tersebut dipicu oleh transfer teknologi, modal dan berbagai modal asing lainnya yang diberikan oleh perusahaan – perusahaan asing.

Melihat dari keberhasilan negara – negara tersebut dan keuntungan sebagai penerima modal asing, Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk menarik masuknya investasi asing. Dalam masa pemerintahannya Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 Republik Indonesia menerapkan berbagai kebijakan reformasi ekonomi untuk menarik masuknya investasi asing. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan Reformasi Struktural secara garis besar membahas tentang

⁴ World Bank Group. Cambodia Economic Update. Cambodia : World Bank Group., 2019.

⁵ World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies : Key Messages and Overview. Jenewa : United Nations Conference On Trade and Development., 2018.

pemberantasan korupsi, reformasi struktur dalam mikro-ekonomi, dan peningkatan iklim investasi melalui stabilitas politik. Reformasi struktural sendiri telah berhasil dalam meningkatkan investasi asing yang berpengaruh langsung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 6,3% di tahun 2007 dengan tingkat inflasi yang rendah yaitu kurang dari 0.1% per-tahunnya. Bukan hanya itu, jumlah masyarakat yang dinyatakan miskin di Indonesia pun relatif stabil di bawah 18%.⁶

Hingga akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan jumlah investor terbesar di Indonesia. Terhitung sejak awal pemerintahan Yudhoyono, *foreign direct investment* yang diterima Indonesia dari Amerika Serikat cenderung mengalami peningkatan dengan rata - rata pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) 18% per tahun.⁷ Bahkan di akhir masa pemerintahan Yudhoyono, investasi asing telah meningkat hingga US\$ 28,53 atau naik 76%. Terdapat lebih dari 30 tenaga kerja yang terserap setiap US\$ 1 juta yang diinvestasikan Amerika Serikat ke Indonesia. Investasi asing ini telah menyerap lebih dari 930.905 tenaga kerja di Indonesia pada masa pemerintahan Yudhoyono. Bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan, *foreign direct investment* yang diberikan Amerika Serikat juga telah meningkatkan alokasi

⁶ Damien Kingsbury. "Indonesia in 2007: Unmet Expectations, Despite Improvement," *Asian Survey*, Vol. 48 Iss. 1 (2008): hlm. 38-46.

⁷ Badan Koordinasi Penanaman Modal. Realisasi Penanaman Modal PMDN –PMA : Triwulan IV dan Januari – Desember tahun 2018. Jakarta : BKPM, 2019.

dana investasi lebih dari 150% untuk pelatihan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal yang kompetitif di tahun 2007 hingga 2012.⁸

Secara kasat mata investasi yang diberikan Amerika Serikat telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas serta menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah masyarakat miskin yang relatif stabil di bawah 18%. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik juga ditunjukkan dengan Rupiah semakin menguat di rentang Rp 9.124 terhadap Dolar Amerika Serikat, dan menurunnya utang luar negeri Indonesia.⁹ Kemiskinan di Indonesia juga mengalami penurunan dari 28,41% di awal masa pemerintahan hingga 10,96% di akhir masa pemerintahan Yudhoyono. Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus membaik dengan tingkat inflasi yang rendah (<0.1%) per-tahunnya.¹⁰ Pertumbuhan ini membuktikan keberhasilan dari tujuan *foreign direct investment* yaitu untuk membangun perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan negara – negara berkembang keluar dari jebakan kemiskinan.

1.2. Identifikasi Masalah

Meski demikian pada tahun 2012, Bank Dunia mengategorikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesenjangan sosial tertinggi ke-41 di dunia pada

⁸ World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2016–2017. Jenewa: World Economic Forum., 2016.

⁹ Ibid.

¹⁰ Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan.” 2017. Diakses pada 10 Oktober 2019.
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>

tahun 2012 karena tidak menunjukkan penurunan tingkat kesenjangan sosial yang signifikan.¹¹ Hal ini dibuktikan dengan Koefisien Gini yang terus meningkat bahkan mencapai angka 0,413 sebagai puncak tertinggi angka ketimpangan sosial selama masa pemerintahan Yudhoyono maupun kemerdekaan Indonesia. Meningkatnya tingkat kesenjangan sosial sebesar 30% pada masa pemerintahan Yudhoyono menyebabkan Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat pendapatan rendah dan gap atau tingkat ketimpangan sosial yang tinggi di dunia internasional. Tentunya peningkatan Koefisien Gini hingga mencapai kondisi boom atau posisi tertinggi merupakan hal yang buruk karena menunjukkan kondisi perekonomian di Indonesia yang sangat timpang. Meskipun jumlah masyarakat miskin terus menurun namun masyarakat yang masih miskin hidup dalam kondisi yang jauh lebih miskin (kurang lebih 30%) jika dibandingkan sebelum masa pemerintahan Yudhoyono.¹²

Hal ini menjadi permasalahan yang perlu digaris bawahi karena indikator yang menjadi permasalahan khususnya di negara berkembang seperti Indonesia bukan hanya tingkat pertumbuhan ekonomi namun juga pemerataan aspek kebutuhan lainnya yang tidak terpenuhi seperti sarana pendidikan, kesehatan, sanitasi, keamanan, tempat tinggal yang layak, informasi, kesempatan untuk terlibat dalam politik serta pemenuhan kebutuhan sosial. Ketidakmerataan ini terjadi

¹¹ World Bank, *Assessing Aid*. New York: Oxford University Press. 1998.

¹² Mohammad Zulfan Tadjoeddin. "Income Inequality High, Economic Inequality Higher." *The Jakarta Post*. 8 Oktober 2014. Diakses 10 Oktober 2019.
<https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/08/income-inequality-high-economic-inequality-higher.html>

khususnya di daerah selain Pulau Jawa seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.¹³ Didasari permasalahan yang telah dijabarkan, perlu diteliti lebih jauh mengenai dampak positif, negatif maupun tidak berdampak sama sekali dari foreign direct investment yang diberikan Amerika Serikat terhadap ketimpangan sosial di Indonesia.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi penelitian selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu tahun 2004 hingga 2014. Penulis memilih periode tersebut karena pada masa itu foreign direct investment yang diberikan Amerika Serikat pada Indonesia cenderung terus meningkat hingga akhir pemerintahan Yudhoyono. Penulis juga akan membatasi penelitian dengan memfokuskan dampak foreign direct investment yang diberikan Amerika Serikat pada Indonesia hanya dari sektor kesenjangan sosial di Indonesia dan bagaimana perkembangannya sejak awal pemerintahan hingga akhir pemerintahan Yudhoyono.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah Dalam perumusan penelitian ini penulis akan mengajukan pertanyaan penelitian yaitu : **“Mengapa *Foreign Direct Investment* yang**

¹³ Gindo Tampubolon, “Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003–2013),” *Social Indicators Research*, Vol. 128 Iss. 2 (2016): hlm. 559-587, p. 567-573.

diberikan Amerika Serikat meningkatkan ketimpangan sosial di Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ?”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dirumuskannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika *Foreign Direct Investment* yang diberikan Amerika Serikat serta pengaruhnya terhadap tingkat kesenjangan sosial di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2014.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Menjadikan bahan penelitian ini sebagai bahan untuk mengevaluasi pengaruh dari *foreign direct investment* yang diterima Indonesia.
2. Sebagai bahan penelitian dan referensi untuk mencegah kerugian yang diterima Indonesia dari *foreign direct investment*
3. Sebagai bahan penelitian untuk menggunakan *foreign direct investment* yang diberikan sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien, mencegah dampak buruk yang terjadi serta memaksimalkan keuntungan yang Indonesia dapatkan

1.4. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis menghadirkan paparan singkat mengenai dampak *foreign direct investment* sebagai modal asing terhadap kesenjangan sosial di negara penerima. Secara garis besar terdapat tiga pandangan dampak yang diberikan modal asing bagi negara penerima. Pandangan yang pertama memandang investasi asing memiliki berbagai dampak yang baik untuk negara penerima, pandangan yang kedua meyakini investasi asing memiliki dampak yang buruk untuk negara penerima dan pandangan ketiga meyakini dampak positif maupun negatif dari investasi asing bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh negara penerima.

Kajian literatur yang pertama berasal dari buku hasil karya Jeffrey Sachs yang berjudul *The End of Poverty*. Sachs menyatakan bahwa modal asing merupakan jalan keluar bagi pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan global. Dalam bukunya Jeffrey Sachs menyatakan bahwa kesenjangan sosial dan kemiskinan terjadi karena sistem internasional yang tidak memberikan kesempatan bagi negara berkembang yang didominasi oleh masyarakat yang dikategorikan lebih miskin untuk keluar dari keadaan perekonomiannya yang buruk. Hal ini dibuktikan dengan hukum ekonomi internasional yang secara sengaja maupun tidak seringkali menciptakan kondisi yang menghilangkan kesempatan bagi negara berkembang dan terbelakang untuk keluar dari keterpurukannya.

Beberapa diantaranya adalah pemberian modal pembangunan yang tidak memadai dan tepat sasaran, hambatan terhadap perdagangan proteksionis dan hak kekayaan intelektual, sistem ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi secara global serta sebagainya. Jeffrey menyatakan bahwa dua solusi utama untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan sosial di dunia adalah dengan menghilangkan sistem ekonomi tersebut dan memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (sandang, pangan dan papan). Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengakhiri kemiskinan adalah program bantuan *Millennium Development Goals* yang disepakati pada 2002. Meskipun upaya tersebut belum berhasil dan belum dilakukan di seluruh negara secara serentak, namun Jeffrey menyatakan bahwa hal tersebut adalah langkah awal untuk mengakhiri *extreme poverty* dan ketidakmerataan di dunia pada tahun 2025.¹⁴

Kajian berikutnya diambil dari teori ilmu hubungan internasional liberalisme dengan beberapa tokoh pemikir seperti Immanuel Kant, John Locke, Voltaire, Montesquieu dan Adam Smith. Liberalisme meyakini bahwa dalam sistem internasional, tiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan berupa modal asing dari negara lainnya. Sistem yang saling mempengaruhi dan membutuhkan aktor – aktor lainnya disebut sebagai *system of loops*. Dalam sistem ini, liberalisme meyakini tidak akan terjadi konflik dalam jenis apapun karena ketika suatu negara berkonflik dengan negara lain, kedua negara tersebut telah kehilangan rekan dagang dan pangsa pasar di negara tersebut

¹⁴ J.D. Sachs. *The End of Poverty*. New York: The Penguin Press. 2005.

sehingga merugikan perekonomian negara dengan menghilangkan salah satu pemasukan negaranya. Didasari ketergantungan tersebut, tiap aktor dalam dunia internasional akan bekerjasama dan membantu aktor lainnya untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama.¹⁵ Didasari kepentingan nasional dan ketergantungan dalam liberalisme, kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi perekonomian negara lainnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan bantuan asing untuk memulihkan negara – negara Eropa yang dikenal dengan *Marshall Plan* atau Official Development Assistance (ODA).¹⁶

Sebagai upaya dalam pemberian bantuan asing agar dilakukan tepat sasaran dan efektif terdapat enam prinsip utama yang harus dilakukan negara pendonor menurut IMF. Prinsip tersebut adalah selektivitas dalam pemilihan negara penerima dan jumlah donor, penentuan orientasi hasil, orientasi klien, efektivitas biaya, prinsip integritas dalam pengelolaan keuangan serta hubungan kemitraan yang baik di antara negara pendonor dan penerima bantuan. Di sisi lain, negara penerima bantuan asing juga perlu menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana bantuan asing, program investasi publik, dukungan donor untuk program pemerintah dan pemrograman fiskal menengah.¹⁷

¹⁵ Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press. 2010.

¹⁶ Roosevelt Seede. "The Impact of Foreign Aid on Extreme Poverty: A Case Study of Liberia's Development Complexities." Disertasi doktoral, East Tennessee State University, 2018.

¹⁷ Robert A. Zimmerman, "The Determinants Of Foreign Aid," *Asian Journal of Social Science*, no. 2 (2007): hlm. 29-46.

Sebagai pedoman dalam pemberian bantuan asing, lebih dari 100 negara yang terdiri dari negara berkembang dan negara maju mengikuti *Paris Declaration* pada tahun 2005 di Paris. Deklarasi ini merupakan pertemuan yang menyepakati sebuah sistem sebagai pedoman dalam pemberian bantuan asing. Pedoman ini terdiri dari langkah – langkah dalam pengimplementasian bantuan asing sehingga bantuan yang diberikan dapat efektif dalam mencapai tujuan pemberian investasi asing dan pertumbuhan pembangunan khususnya di negara- negara berkembang. *Paris Declaration* didirikan sebagai langkah awal dalam pembentukan badan internasional yang bertugas untuk mengawasi pemberian investasi asing di dunia internasional agar negara pendonor dan penerima memiliki laporan finansial dan bantuan asing lainnya secara transparan.¹⁸

Deklarasi ini berisi 56 perjanjian kemitraan yang didasari lima prinsip bantuan asing yang lebih efektif. Prinsip yang pertama adalah *ownership* yaitu negara berkembang yang menerima bantuan asing dari negara pendonor berhak menentukan strategi pembangunan dan perbaikan institusi mereka secara mandiri tanpa campur tangan pendonor. Tentunya hal ini tetap diawasi oleh negara pendonor untuk menghindari program dan penggunaan dana secara tidak efektif seperti korupsi. Prinsip kedua adalah *alignment* yaitu penyesuaian strategi bantuan yang diberikan oleh pendonor dan penerima sesuai dengan sistem lokal sehingga tidak terjadi bentrokan dengan budaya dan masyarakat lokal.

¹⁸ KPMG International Cooperative. “The Paris Declaration on Effectiveness and Impact: What’s Next in Busan?” *Development Advisory Services (DAS) Impact Paper 5* (2011).

Prinsip ketiga adalah *harmonisation* yaitu adanya penyederhanaan prosedur dan sistem strategi bantuan yang terkoordinasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi seperti duplikasi dan sebagainya. Prinsip keempat adalah *managing for result* yaitu proses pencapaian dan pengukuran keberhasilan bantuan asing yang diberikan dilakukan oleh pihak pendonor maupun penerima dan prinsip yang terakhir adalah *mutual accountability*. Pada dasarnya *Paris Declaration* menyatakan bahwa dalam pemberian bantuan asing negara pendonor harus menyesuaikan bantuan yang diberikan dengan aset yang dimiliki negara penerima. Bantuan yang diberikan pun harus memiliki strategi yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan negara penerima dan disertai dengan rencana pengelolaan dana bantuan dalam jangka panjang.¹⁹

Selain itu IMF juga menyatakan bahwa investasi asing yang diberikan negara donor dapat menciptakan kondisi ekonomi di negara penerima yang lebih baik. Hal ini terjadi saat bantuan asing yang diberikan dimanfaatkan untuk membangun *public goods* seperti sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa investasi asing dapat memberantas kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendapatan masyarakat dibawah standar yang telah ditetapkan melainkan kurangnya standar kesehatan dan pendidikan. Selain itu IMF juga menyatakan bahwa bantuan asing membawa kondisi sosial negara penerima menjadi lebih stabil karena ketersediaan *public goods* menciptakan kesejahteraan, *skilled labor*

19 Nathan Andrews. "Foreign Aid And Development in Africa: What The Literature Says and What The Reality Is." *Journal of African Studies and Development*, Vol. 1 (2009): hlm 8-15.

dan kondisi ekonomi yang lebih baik. Masuknya investasi asing juga merupakan jalan untuk menghidupkan sektor bisnis negara penerima sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kajian literatur selanjutnya adalah tulisan milik Robert W. Jackman yang menyatakan bahwa investasi asing yang dilakukan oleh *transnational corporations* (TNCs) menghambat pertumbuhan ekonomi di negara penerima. Hal ini disebabkan oleh kekuatan ekonomi TNCs yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara penerima. Seringkali, negara menjadi sangat bergantung pada TNCs karena menampung lapangan tenaga kerja dan menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Dalam prakteknya, perbedaan kekuatan yang besar ini membuat negara penerima kehilangan kemampuan otonominya untuk mengatur politik negaranya sendiri. Negara berkembang umumnya akan mengubah sistem politik maupun kebijakan – kebijakannya demi menjaga investasi jangka panjang yang diberikan oleh TNCs. TNCs juga dapat mengatur kebijakan negara penerima yang menguntungkan perusahaannya dengan ancaman akan menghentikan investasi yang diberikan.

Bukan hanya menyebabkan ketergantungan dan menghilangkan hak otonomi negara, *foreign direct investment* juga menciptakan kelompok – kelompok kelas di masyarakat karena hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merata karena hanya terfokus di sektor tertentu. Investasi yang diberikan bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia di negara penerima melainkan mengeksploitasi tenaga kerja dengan harga yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan terciptanya kesenjangan sosial dan politik antar kelompok di

masyarakat. Padahal kesenjangan politik dan sosial berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial yang berujung pada gangguan ekonomi.²⁰

Argumen Robert W. Jackman juga didukung oleh Macarena Suanes yang melakukan penelitian terkait dampak *foreign direct investment* khususnya di Amerika Latin. Pada umumnya investasi asing diberikan ke dalam tiga sektor yaitu *primary sector* (bahan mentah seperti minyak, batu bara dan sebagainya), industri manufaktur dan jasa. Suanes menemukan bahwa pemberian FDI yang tidak merata tersebut menyebabkan adanya kesenjangan diantara pendapatan tenaga kerja sektor *primary sector*, industri manufaktur dan jasa dengan sektor – sektor lainnya di negara tersebut. Ketimpangan ini diperburuk oleh sektor industri yang *didukung* mesin hasil transfer teknologi oleh TNCs. Sehingga perusahaan – perusahaan tersebut hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Meskipun tingkat produktivitas tinggi, hasil dari investasi asing ini hanya bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat di negara penerima.²¹

Berbeda dengan kajian lainnya, Rui Moura dan Rosa Forte meyakini bahwa dampak yang diberikan oleh investasi asing bergantung pada karakteristik investor dan negara penerima dalam tulisannya yang berjudul *The Effects of Foreign Direct Investment on The Host Country Economic Growth*. Mereka meyakini bahwa pemerintah negara penerima investasi asing memiliki kekuasaan penuh untuk membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan maupun meminimalisir

²⁰ Robert W. Jackman, "Dependence on Foreign Investment and Economic Growth in the Third World." *World Politics* (1982): hlm 175-196.

²¹ Macarena Suanes, "Foreign Direct Investment And Income Inequality In Latin America: A Sectoral Analysis." *Cepal Review* 118 (2016): hlm 46-60.

kerugian dari FDI termasuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial maupun eksploitasi di negaranya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih proyek investasi asing yang sesuai dengan kebutuhan negaranya sendiri.

FDI akan menguntungkan negara penerima karena dapat memicu perusahaan – perusahaan lokal dalam kemajuan teknologi, pemberdayaan tenaga kerja dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah lokal juga turut mendukung sektor lokal dalam mengikuti kemajuan penerima FDI. Tanpa kebijakan dan program yang sesuai, program FDI hanya akan memicu negara penerima untuk bergantung pada impor dalam mengimbangi kemajuan perusahaan multinasional yang jauh lebih maju. Hal ini disebabkan perusahaan multinasional yang telah jauh lebih maju akan membutuhkan lebih banyak bahan baku, tenaga kerja dan teknologi yang lebih baik dalam jumlah maupun kualitas.

Bukan hanya itu, investasi asing juga hanya akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun manusia jika negara penerima tidak memiliki regulasi dan kebijakan yang jelas terkait laba perusahaan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional. Umumnya hal ini terjadi di negara berkembang yang masih tertinggal dalam teknologi. Seringkali perusahaan multinasional tidak memberikan laba hasil aktivitas perusahaan di negara penerima dengan dalih telah memberikan teknologi sebagai bayaran. Rui Moura dan Rosa Forte meyakini bahwa perusahaan

multinasional sebagai investor telah menerima keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh negara penerima.²²

Literatur – literatur yang telah dipaparkan merupakan hasil penelitian para ahli – ahli terhadap dampak investasi asing khususnya bagi negara penerima. Secara garis besar, penulis beranggapan bahwa investasi asing memiliki dampak positif dan negatif terhadap negara penerima investasi asing. Hal ini sesuai dengan kajian literatur terakhir hasil penelitian Rui Moura dan Rosa Forte. Namun yang membedakan kajian penulis dengan kajian literatur tersebut adalah pembahasan dan penjelasan mengenai dampak buruk yang disebabkan dalam jangka pendek dan dampak positif dalam jangka panjang yang diberikan *oleh foreign direct investment* sesuai dengan teori modernisasi.

1.4.2. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai hubungan antara *foreign direct investment* dan kesenjangan sosial, penulis menggunakan pandangan teori modernisasi terhadap modal asing berupa *foreign direct investment*. Ronald Inglehart dan Christian Welzel sebagai salah satu pencetus pandangan teori modernisasi terhadap modal asing menyatakan bahwa kesenjangan sosial atau *inequality* merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terlepas dari proses modernisasi di negara berkembang. Dalam situasi terperangkap dalam

²² Rui Moura, Rosa Forte, “The Effects of Foreign Direct Investment on The Host Country Economic Growth : Theory and Empirical Evidence.” *The Singapore Economic Review* (2013).

keterpurukan, investasi modal asing dari negara maju merupakan satu – satunya pemicu proses modernisasi dan jalan keluar bagi negara dunia ketiga.²³

Teori ini pertama kali dicetuskan di era perang dingin. Di era tersebut, dunia terbagi ke dalam dua kelas yaitu negara dengan pendapatan tinggi dan negara dengan pendapatan rendah. Modernisasi meyakini bahwa seiring berjalannya waktu negara dengan pendapatan menengah akan mengalami proses modernisasi dan berkembang menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Sehingga negara dengan pendapatan menengah akan menghilang.

Dalam sistem internasional, modal asing merupakan satu – satunya jalan keluar bagi keterpurukan negara dunia ketiga. *Foreign direct investment* merupakan instrumen yang mendorong negara dengan pendapatan rendah untuk mengejar ketertinggalannya melalui proses modernisasi. Proses modernisasi ini dibagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan pembangunan dan tahapan perkembangan. Tahapan pembangunan diawali dengan masuknya investasi asing. Meski demikian, negara asing hanya akan berinvestasi di sektor yang memberikan hasil yang dianggap signifikan. Sehingga pada umumnya investasi asing hanya akan diberikan di sektor industri dan manufaktur saja.

Di sisi lain, salah satu karakteristik utama negara berkembang adalah didominasi oleh sektor agraris atau pertanian.²⁴ Pemberian modal asing menyebabkan terjadinya peningkatan secara signifikan dalam sektor industri dan

²³ Ronald Inglehart, dan Christian Welzel. *Modernization, Cultural Change and Democracy : The Human Development Sequence*. New York: Cambridge University Press, 2005.

²⁴ Prateek Goorha. *Modernization Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

manufaktur di negara penerima. Peningkatan yang dimaksud merupakan jumlah usaha dalam sektor industri dan manufaktur, jumlah pekerja serta tingkat pendapatan. Di saat yang bersamaan sektor pertanian akan mengalami keterpurukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sektor agraris untuk bersaing dengan sektor industri dan manufaktur yang didukung oleh modal asing dan teknologi. Padahal sebagian besar pemasukan dan lapangan pekerjaan negara berkembang masih berasal dari sektor pertanian.

Ketidakseimbangan antara sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur dan industri menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial khususnya bagi masyarakat negara berkembang yang sektor ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian. Masyarakat dan usaha yang bergerak di sektor industri dan manufaktur akan memiliki produktivitas dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mayoritas masyarakat lainnya yang berada di sektor pertanian. Hal ini disebabkan investasi asing yang diwujudkan dalam teknologi diterapkan oleh sektor manufaktur dan industri negara penerima.

Teori ini meyakini bahwa kesenjangan di antara sektor industri manufaktur dan pertanian akan terus meningkat. Kesenjangan sosial ini akan terus berlanjut hingga terjadi perpindahan secara masif dari sektor pertanian ke sektor industri dan manufaktur di negara penerima. Perpindahan sektor mayoritas pertanian ke sektor industri dan manufaktur serta menurunnya kesenjangan sosial merupakan tahap kedua dari proses modernisasi negara berkembang. Namun hal ini hanya akan terjadi ketika sektor industri dan manufaktur negara penerima investasi asing telah

mengalami pertumbuhan ekonomi secara bertahap hingga mampu menstabilkan perekonomian negara.

Dalam jangka panjang, sektor industri dan manufaktur negara penerima investasi asing akan memperbaiki perekonomian negara melalui sistem yang lebih demokratis. Teori modernisasi meyakini bahwa pemberian investasi asing tidak hanya mengubah sektor yang mendominasi perekonomian negara menjadi sektor industri dan manufaktur melainkan mengubah sistem perekonomian, politik dan sosial negara penerima. Sektor perekonomian yang didominasi sektor industri dan manufaktur ini secara langsung menuntut masyarakat negara penerima investasi asing untuk menyediakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan khusus atau biasa disebut spesialisasi. Sehingga sektor industri dan manufaktur yang mendominasi perekonomian negara juga akan menuntut masyarakat sebagai sumber tenaga kerja yang lebih tereduksi. Hal ini secara langsung akan menyebabkan meningkatnya tingkat pendidikan di negara penerima investasi asing.²⁵

Teori modernisasi juga meyakini bahwa dominasi sektor industri dan manufaktur bukan hanya meningkatkan perekonomian dan pendidikan negara penerima melainkan mengubah prinsip serta nilai – nilai tradisional negara penerima investasi yang dianggap tidak efektif dan rasional. Melalui peningkatan tingkat pendidikan dan perubahan orientasi nilai dan prinsip – prinsip modern, negara penerima investasi asing akan mampu menciptakan strategi dan sistem

²⁵ Ibid.

ekonomi serta strategi pembangunan yang lebih rasional. Sehingga kesenjangan sosial di negara penerima investasi asing akan menghilang karena menerapkan sistem distribusi pemerataan pendapatan (sistem ekonomi dan politik) yang lebih demokratis.²⁶

Untuk mempertajam penelitian, penulis menambahkan beberapa konsep tambahan yaitu konsep tentang investasi asing atau *foreign direct investment*, kesenjangan sosial dan kemiskinan. Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendefinisikan *foreign direct investment* atau penanaman modal asing sebagai investasi yang dilakukan oleh aktor ekonomi ke aktor ekonomi lintas negara lain. Kedua pihak memiliki kepentingan dan kontrol yang saling berkaitan dalam jangka panjang. Sebagai pemberi modal, investor memiliki hak untuk mengatur manajemen perusahaan penerima investasi tersebut. Pemberian investasi asing dapat dilakukan oleh individu maupun sebuah entitas bisnis.²⁷ Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang – Undang no.1 tahun 1967, pemerintahan Indonesia secara resmi meyakini bahwa investasi asing adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang serta digunakan sebagai dasar untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Pemilik modal juga bertanggung jawab atas segala resiko dalam dari penanaman modal tersebut.²⁸

²⁶ Pan-Long Tsai, “Foreign Direct Investment and Income Inequality: Further Evidence.” *World Development Vol. 23* (1995): 469-483.

²⁷ World Investment Report. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development : Definitions and Sources. World Investment Report, 2007.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Terdapat dua jenis *foreign direct investment* yaitu *outward* dan *inward*. *Inward foreign direct investmen* adalah investasi asing yang dilakukan dari negara asing ke sebuah perusahaan di negara lokal. Sedangkan *outward foreign direct investment* adalah investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ke perusahaan asing di negara lain. Dalam penelitian ini, penulis akan memakai jenis *inward foreign direct investment* karena membahas mengenai dampak dari *foreign direct investment* yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap kesenjangan sosial di Indonesia. Sehingga penting untuk membahas konsep dari kesenjangan sosial atau *inequality* terlebih dahulu.

Foreign Direct Investment merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya untuk mencari keuntungan lebih seperti tenaga kerja yang lebih murah, sumber daya alam yang melimpah, memperluas pasar produk dan sebagainya. Meski demikian hal ini membutuhkan koordinasi operasi yang cukup rumit dikarenakan jauhnya jarak lintas negara. Sehingga dalam mencari negara tujuan yang tepat, investor sebagai pemberi perlu mempertimbangkan kestabilan sosial, politik dan ekonomi untuk memastikan koordinasi dan pengawasan di masa depan akan berjalan lancar. Sehingga pada dasarnya, negara – negara yang membutuhkan *Foreign Direct Investment* akan berupaya untuk menjaga kestabilan politik, ekonomi dan sosial, serta berbagai karakteristik yang memudahkan aktivitas perusahaan seperti infrastruktur, rezim perdagangan, keterampilan tenaga kerja dan lembaga birokrasi yang kooperatif.²⁹

²⁹ ibid

Penambahan konsep selanjutnya adalah pengertian mengenai *inequality* atau kesenjangan sosial. Secara garis besar, *inequality* adalah keadaan tidak setara dalam pendistribusian variabel. Variabel yang dimaksud terdiri dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya yang saling berkaitan. Sebagai contoh, pendistribusian pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam standar hidup, akses pendidikan, kesehatan, nutrisi, air dan sebagainya. PBB mendefinisikan bahwa terdapat dua jenis ketidaksetaraan yaitu ketidakmerataan peluang yang disebabkan akses pekerjaan, pendidikan dan transportasi yang tidak merata. Ketimpangan yang kedua adalah ketimpangan hasil yaitu terdapat ketidakmerataan dalam pendistribusian pendapatan, tingkat pendidikan status kesehatan dan sebagainya.³⁰

Untuk mengukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat, pemerintahan Indonesia menggunakan Rasio Gini atau koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan dengan besaran di antara nol hingga satu. Tingkat ketimpangan ini diambil dari kurva Lorenz, yaitu hasil perbandingan dari variabel pendapatan dengan distribusi *uniform* atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Semakin mendekati angka nol maka semakin tinggi pula tingkat kesenjangan sosial. Terdapat tiga patokan tingkat kesenjangan sosial di Indonesia yaitu koefisien kurang dari 0,4 sebagai tingkat ketimpangan rendah, koefisien 0,4 hingga 0,5 sebagai tingkat

³⁰ Development Issues No. 1. Concepts of Inequality. Development Strategy and Policy Analysis Unit, 2015.

ketimpangan sedang dan koefisien lebih dari 0,5 sebagai tingkat ketimpangan tinggi.³¹

Kesenjangan sosial khususnya yang terjadi di Indonesia menjadi penting untuk dikaji karena permasalahan ketidakmerataan ini juga berakhir pada masyarakat yang berada dalam kondisi di bawah garis kemiskinan yang memprihatinkan. Kemiskinan adalah salah satu hambatan terbesar dalam perekonomian negara yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang. Terdapat berbagai pengertian tentang kemiskinan namun secara garis besar menurut *International Poverty Centre*, kemiskinan adalah golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, rasa aman, kesehatan, pendidikan, informasi dan akses untuk terlibat dalam hubungan sosial, institusi serta politik. Pada umumnya permasalahan kemiskinan dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena harus menanggung masyarakat miskin dengan menyediakan jaringan pengaman sosial.

Permasalahan kemiskinan khususnya di negara berkembang terjadi karena dua alasan utama yaitu rata – rata pendapatan yang rendah serta buruknya tingkat pemerataan yang memperbesar tingkat kesenjangan sosial. Hal ini seringkali terjadi di negara berkembang dengan tingkat perekonomian menengah seperti Indonesia. Tumbuhnya perekonomian dan rata – rata pendapatan tanpa adanya pemerataan

³¹Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “GINI Ratioo.” Diakses pada 1 Oktober 2019, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf>

menghasilkan ketimpangan di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang umumnya menciptakan situasi lapangan pekerjaan yang menuntut tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu yang mampu mengakses pendidikan. Sedangkan perkembangan kaum tenaga kerja berpendidikan masih sulit muncul di negara berkembang. Hal ini menjadi salah satu alasan semakin banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan dan tingginya kesenjangan sosial di negara berkembang.

Secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyatakan bahwa kesenjangan sosial dapat diatasi melalui perluasan lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan UMKM dengan pemberian bantuan seperti Kredit Usaha Rakyat, bantuan akses pemasaran dan program – program pelatihan untuk mendorong tumbuhnya UMKM di kalangan masyarakat. Berbeda dengan bantuan tunai yang bersifat instan upaya ini secara langsung dapat menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam jangka panjang. Selain itu, berbagai program seperti bantuan program sertifikat tanah, kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan khususnya masyarakat miskin perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus menurunkan kesenjangan sosial di Indonesia.³²

Berbeda dengan sekedar mengatasi kemiskinan, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi kesenjangan sosial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau biasa disebut Badan Perencanaan

³² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Kesenjangan Sosial Masih Menjadi Tantangan Bangsa.” Diakses pada 1 Oktober 2019, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20996/t/Kesenjangan+Sosial+Masih+Menjadi+Tantangan+Bangsa>

Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pengentasan kesenjangan sosial di Indonesia akan dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan dari distribusi pendapatan dan konsumsi secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui fokus utama pemerintahan yaitu peningkatan *equality of opportunity* dan redistribusi. Peningkatan *equality of opportunity* adalah pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam fasilitas kesejahteraan yaitu akses pendidikan dari jenjang terendah hingga tinggi, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sedangkan upaya *equality of opportunity* dilakukan melalui modal yang didapat dari upaya redistribusi yaitu sistem perpajakan yang progresif. Sistem perpajakan ini merupakan sistem penerimaan pajak yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kesempatan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses fasilitas atau memenuhi kebutuhan mereka.³³

1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1. Metode Penelitian

Dalam meneliti dampak *foreign direct investment* yang diberikan Amerika terhadap kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penulis menggunakan penelitian kualitatif dari kajian literatur yang berasal dari sumber yang sudah terverifikasi sehingga cukup kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan

³³ Bappenas. Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2012.

penelitian. Data yang digunakan berasal dari penelitian dan pemahaman aspek kehidupan sosial dengan metode yang pada umumnya berbentuk kata sebagai bahan penulis untuk menganalisis kasus.³⁴ Sedangkan untuk jenis penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.³⁵

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam meneliti dampak *foreign direct investment* yang diberikan Amerika terhadap kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yaitu menggunakan kajian literatur terpercaya seperti buku cetak, majalah, artikel, jurnal, berita, website resmi serta beberapa sumber internet dari situs resmi.³⁶

1.6. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul **”Dampak *Foreign Direct Investment* yang Diberikan Amerika Serikat Terhadap Kesenjangan Sosial di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”** ini akan disusun ke dalam empat Bab. Bab 1 membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi

³⁴ Bakry, Umar Suryadi. 2016. “Metodologi Penelitian: Kualitatif Versus Kuantitatif.” Dalam *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, oleh Umar Suryadi Bakry, 16. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2007.

³⁶ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 2005.

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya di Bab 2, penulis akan membahas mengenai kebijakan terkait *foreign direct investment* secara umum di Indonesia sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang kondusif khususnya dengan Amerika Serikat di sub bab keempat. Di sub bab kedua, penulis akan membahas mengenai kebijakan mengenai investasi asing secara spesifik di masa pemerintahan Yudhoyono. Kebijakan ini di dasari khususnya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Terakhir, penulis akan membahas mengenai kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia secara general sejak awal Indonesia berdiri untuk menunjukkan perubahan signifikan terkait kesenjangan sosial yang terjadi di bawah masa pemerintahan Yudhoyono.

Di Bab 3, penulis akan mengaitkan teori yang telah di paparkan dengan data yang didapatkan melalui penelitian. Bab 3 terdiri dari 2 sub bab yang membahas dua ide utama yaitu pemasukan investasi asing di sub bab pertama dan dampak yang diberikan dari pemasukan investasi asing tersebut. Sub bab pertama terdiri dari dua sub sub bab yaitu keuntungan yang di dapat kedua pihak sehingga menyebabkan peningkatan pemasukan investasi asing di Indonesia secara signifikan sebagai sub sub bab kedua.

Sedangkan sub bab kedua terdiri dari dua sub sub bab. Sub sub bab yang pertama menganalisis tahap pembangunan sebagai tahapan awal proses

modernisasi masuknya investasi asing khususnya di sektor industri manufaktur .
Sub sub bab kedua membahas tahapan kedua sebagai tahap lanjutan setelah Indonesia menerima investasi asing dan mengalami dampak yang telah di paparkan oleh teori modernisasi seperti pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri manufaktur dan sistem politik sosial serta ekonomi yang demokratis sehingga terjadi distribusi pendapatan yang merata.

Di Bab 4, penulis akan merangkum keseluruhan penelitian di bagian kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan saran penggunaan *foreign direct investment* untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia.